

PERSEPSI MAHASIWA TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Slamet
IKIP Veteran Semarang
Email: slametikipvetsmg@yahoo.com

Diterima: Nopember 2017. Disetujui: Desember 2017. Dipublikasikan: Januari 2018

ABSTRAK

Fakta historis dan geografis serta kultural menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki keberagaman atau pluralitas yang tinggi. Bangsa Indonesia lahir bukan terutama didorong oleh persamaan, tetapi lebih dari itu justru didorong karena kesadaran terhadap perbedaan yang menimbulkan keinginan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa yang memiliki tujuan bersama yaitu merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keberagaman atau pluralitas ini sudah disadari baik oleh para penguasa maupun rakyat sejak masa pramodern, oleh sebab itu gagasan ideal yang terkristalisasi dalam semboyan 'bhinneka tunggal ika' muncul semenjak zaman Majapahit.

Semboyan ideal bhinneka tunggal ika bukan hanya sekedar kesadaran terhadap pluralitas, tetapi lebih dari itu merupakan gagasan multikulturalisme yaitu hidup berdampingan dalam koeksistensi damai dalam masyarakat madani yang heterogen. Pluralitas masyarakat Indonesia sangat berpotensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Berbagai konflik horizontal yang selama ini terjadi banyak bersumber dari aspek pluralitas masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu semangat dan nilai-nilai multikulturalisme harus ditanamkan kepada segenap elemen masyarakat khususnya generasi muda. Dalam hal ini lembaga pendidikan sekolah menduduki peran penting sebagai media untuk sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai multikulturalisme.

Mata pelajaran sejarah sangat potensial untuk upaya penanaman nilai-nilai multikulturalisme. Hal itu bisa dilakukan dengan melalui penyusunan materi pembelajaran dengan mainstreaming aspek-aspek pluralitas dalam sejarah Indonesia secara diakronis. Selain itu perlu diterapkan strategi dan model pembelajaran sejarah sebagai intellectual training yang mencerahkan. Dengan demikian pembelajaran sejarah akan menghasilkan para peserta didik yang mengapresiasi nilai-nilai multikulturalisme.

Kata kunci: implementasi nilai multikulturalisme, pembelajaran sejarah belajar.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mencoba mengkaji pentingnya pembelajaran sejarah di sekolah sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai multikulturalisme kepada generasi muda. Slamet (2017) menyatakan tentang pentingnya mata pelajaran sejarah diberikan kepada peserta didik untuk membangun karakter generasi muda sebagai penerus bangsa yang demokratis dan bertanggungjawab dari kemultikulturalan nilai-nilai pada bangsa Indonesia yang beragam. Pembahasan ini sangat penting mengingat bahwa berbagai ketegangan, konflik, dan kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia hingga

saat ini (barangkali) sebagian besar bersumber dari pelanggaran terhadap nilai-nilai multikulturalisme yang mestinya harus dipahami dan dihayati serta menjadi semacam sikap hidup masyarakat Indonesia yang beragam/plural (Kompas, 2018). Berbagai analisis telah muncul di berbagai media massa. Salah satu media massa berpendapat jika berbagai konflik yang bersumber dari sara (suku, agama, ras dan antar golongan) ini dibiarkan dan terus-menerus terjadi tanpa ada upaya penyelesaian, maka tidak mustahil akan menyebabkan kerugian besar terhadap bangsa dan negara dan bahkan juga dapat menyebabkan disintegrasi nasional.

Menurutnya, hampir semua konflik-konflik yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: terjadinya perubahan kondisi sosial politik dan ekonomi; imbas benturan antar peradaban yang terjadi; kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat, kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat, tidakadilan, dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu masih adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan juga menjadi sumber penting dari konflik yang terjadi. Demikian juga pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi menjadi faktor yang sangat penting bagi berkembangnya konflik yang berbau sara. Analisis ini tampaknya mempertontonkan kegalauan bahwa lembaga-lembaga sosial dan bahkan negara tidak mampu menghilangkan akar konflik sara yang bersifat laten. Bahkan sering kali justru sistem politik negara akhir-akhir ini telah memberikan ruang yang tak terkontrol bagi pemanfaatan isu sara untuk kepentingan pencapaian kursi kekuasaan dalam pemilihan umum (Pemilu) terutama setelah pasca-pemerintahan Orde Baru atau masa setelah memasuki reformasi (Bottomley, 2014: 33).

Di tengah kegalauan yang masih berlangsung itu barangkali lembaga sekolah masih memiliki potensi yang bisa diharapkan menjadi media untuk membangun karakter generasi muda yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme. Melalui sekolah sebagai lembaga pendidikan, bisa dilakukan berbagai upaya untuk melakukan sosialisasi dan enkulturasi berbagai nilai dan sikap serta perilaku sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Sekolah merupakan lembaga utama yang difungsikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Meski dalam rumusan itu sama sekali tidak disinggung tentang penanaman nilai-nilai multikulturalisme, tetapi sesungguhnya sifat-sifat 'warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab' merupakan unsur penting dalam konteks nilai-nilai multikulturalisme.

Diakui atau tidak, senang atau tidak, merebaknya ketegangan, konflik dan kekerasan sosial yang melanda masyarakat Indonesia yang bersumber dari persoalan intoleransi sara mungkin menjadi salah satu indikasi kurangberhasilan

penanaman nilai-nilai multikulturalisme di sekolah. Sudah barang tentu jika penyebab kegagalan itu ditimpakan seluruhnya kepada sekolah maka sesungguhnya hal itu diarahkan kepada beberapa mata pelajaran, mungkin mata pelajaran budi pekerti (jika ada), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Sejarah. Dalam konteks ini maka penting untuk melihat dan merumuskan kembali peran mata pelajaran sejarah dalam penanaman nilai-nilai multikulturalisme di kalangan generasi muda di Indonesia.

Berdasar latar belakang di atas, masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap konsep nilai-nilai multikulturalisme?; 2) cara apa yang ditempuh dalam penanaman nilai-nilai multikulturalisme pada proses pembelajaran?; dan 3) bagaimana memaknai sejarah sesuai dengan semangat nilai-nilai multikulturalisme?

METODE PENELITIAN

Penelitian termasuk jenis kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif, karena penelitian berusaha menggambarkan kondisi nyata yang dihasilkan dari sebaran instrumen/angket sebagai alat pengumpul data utama di lapangan kepada sejumlah responden. Subjek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah di IKIP Veteran Semarang yang berjumlah 59 orang dengan teknik *total sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, dokumen, dan angket. Sebelum instrumen angket disebar kepada 59 responden, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas kepada 10 mahasiswa dengan hasil 0,702 untuk uji validitas dan 0,798 untuk uji reliabilitas. Hasil tersebut lebih besar dari tabel *r product moment* pada $N = 10 = 0,632$. Mengingat $0,702 > 0,632 < 0,798$, maka seluruh instrumen angket telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, sehingga instrumen yang berjumlah 45 item dari 3 (tiga) indikator yang setiap indikator dikupas dengan 15 item pertanyaan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data utama di lapangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase (DP) dengan jawaban skor terbesar 4 (empat) dan jawaban skor terkecil 1 (satu) serta kriteria ditetapkan ada 4 (empat) sehingga tabel rentangan deskriptif persentase sebagai berikut.

Tabel 1: Rentangan Analisis Deskriptif Persentase

No	Rentangan Nilai	Kriteria
1	48,76 – 60,00	Sangat Baik
2	37,51 – 48,75	Baik
3	26,26 – 37,50	Cukup baik
4	15,00 – 26,25	Kurang baik

Sumber: Data primer yang diolah,

2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nilai-nilai Multikulturalisme

Persepsi mahasiswa terhadap konsep nilai-nilai multikulturalisme dari 59 responden diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2: Persepsi Mahasiswa terhadap Konsep Nilai-nilai Multikulturalisme

Interval Nilai	Frekwensi	Persentase (%)	Kriteria
48,76 – 60,00	11	18,65	Sangat Baik
37,51 – 48,75	48	81,35	Baik
26,26 – 37,50	-	-	Cukup baik
15,00 – 26,25	-	-	Kurang baik
Jumlah	59	100	

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persepsi mahasiswa terhadap pemahaman konsep nilai-nilai multikulturalisme diperoleh skor terbesar 48 atau 81,35% dari 59 mahasiswa sebagai responden dengan kriteria baik, sehingga dapat dikemukakan bahwa mahasiswa Progdi Pendidikan Sejarah di IKIP Veteran Semarang telah memahami konsep dari nilai-nilai multikulturalisme yang terjadi di negara-bangsa ini.

Hasil tersebut jika dikaitkan dengan teori dapat diberikan pembahasan bahwa selama beberapa dekade terakhir ini, multikulturalisme menjadi bahan diskusi yang sangat hangat di kalangan ilmuwan sosial, budaya, politik, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pejabat pemerintah, dan sebagainya. Kehangatan diskusi mengenai multikulturalisme ini tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan global yang semakin mengakui keberagaman (pluralitas) namun dalam bingkai suasana saling mengakui dan menghargai serta kesediaan untuk dapat hidup berdampingan dalam koeksistensi damai. Dalam hubungan ini, secara umum multikulturalisme sering dimaknai sebagai sebuah paham yang menekankan pada penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut. Oleh karena itu dialog dan toleransi merupakan sesuatu yang esensial dalam paham multikulturalisme (Tilaar, 2004). Konsep multikulturalisme dibedakan dengan pluralisme yang lebih mengacu hanya kepada fenomena pluralitas atau keberagaman atau heterogenitas tanpa mempersoalkan semangat saling mengakui, toleransi, dan koeksistensi damai. Bahkan hal ini sudah sejak lama telah disinggung oleh seorang nasionalis prakemerdekaan G.J.S. Sam Ratulangi yang menyatakan bahwa untuk memecahkan masalah sosial budaya yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang adalah toleransi seluas-luasnya dan kesabaran umum.

Di Indonesia sendiri terdapat kecenderungan untuk memperlakukan konsep multikulturalisme tidak hanya sekedar menjadi bahan kajian ilmiah, tetapi hampir-hampir menjadi semacam ideologi yang hendak diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang aneh, mengingat

secara sosiologis dan kultural masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural yang memiliki potensi sangat besar bagi munculnya konflik dan perpecahan jika tidak disemangati oleh multikulturalisme. Bahkan konsep ini bisa diserupakan dengan konsep ‘bhinneka tunggal ika’. Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik dari sisi ras, etnik, status, kepercayaan, dan sebagainya, namun merupakan suatu kesatuan guna mencapai tujuan bersama dalam konteks NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian semangat ‘bhinneka tunggal ika’ dan multikulturalisme ini bisa merupakan *state of the art* dan sebuah *imagined condition*. Sebagai *state of the art* konsep ini mengacu pada kondisi riil dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan masih jauh dari keyakinan multikulturalisme dengan bukti masih maraknya kekerasan antarelemen di dalam masyarakat. Sebagai *imagined condition*, multikulturalisme ataupun ‘bhinneka tunggal ika-isme’ merupakan sebuah cita-cita yang diidealisasikan yang tentu membutuhkan proses panjang untuk secara terus-menerus perlu perbaikan yang berkesinambungan atau *continual improvement* (Sulistiyono, 2011). Dengan demikian jika konsep pluralisme lebih mengacu pada kondisi *state of the art*, maka multikulturalisme lebih mengacu pada perspektif dan semangat untuk mewujudkan *imagined condition*. Oleh karena latar belakang perkembangan historis yang berbeda-beda antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lain di Indonesia, maka masyarakat juga memiliki tingkat multikulturalitas yang berbeda-beda. Hal itu ditentukan baik oleh karakteristik kondisi alamiah maupun aspek-aspek lain yang terkait seperti: ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi pluralitas masyarakat Indonesia ditentukan baik oleh kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, ras dan kelompok etnik yang sangat beragam, serta sejarah yang berbeda-beda. Pluralitas yang sangat *complicated* itu masih dipertajam dengan perbedaan status dan tingkat ekonomi. Dalam hubungan itulah semangat dan perspektif multikulturalisme (bukan sekedar pluralisme) perlu dikembangkan dalam memperkokoh sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia, yaitu bhinneka tunggal ika. Di sinilah sekolah sebagai lembaga pendidikan yang utama berada di bawah kendali negara memiliki peran penting dalam mewujudkan implementasinya nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penanaman Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah

Persepsi mahasiswa terhadap penanaman nilai-nilai multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah dari 59 responden diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3: Persepsi Mahasiswa terhadap Penanaman Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah

Interval Nilai	Frekwensi	Persentase (%)	Kriteria
48,76 – 60,00	8	13,56	Sangat Baik
37,51 – 48,75	51	86,44	Baik
26,26 – 37,50	-	-	Cukup baik

15,00 – 26,25	-	-	Kurang baik
Jumlah	59	100	

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persepsi mahasiswa terhadap penanaman nilai-nilai multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah diperoleh skor terbesar 51 atau 86,44% dari 59 mahasiswa sebagai responden dengan kriteria baik, sehingga dapat dikemukakan bahwa mahasiswa Progdipendidikan Sejarah di IKIP Veteran Semarang telah memahami terhadap penanaman nilai-nilai multikulturalisme untuk diterapkan dalam proses pembelajaran sejarah.

Hasil tersebut jika dikaitkan dengan teori dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut. Pentingnya pendidikan sejarah dalam pembentukan watak dan sikap anak didik tidak bisa dipungkiri. Pendidikan sejarah di sekolah bukan hanya sekedar berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga berfungsi dalam proses pembentukan afektif dan psikomotor. Dengan pendidikan sejarah, peserta didik tidak hanya menguasai materi dan substansi sejarah tetapi juga mampu memahami dan mengerti masa kini atas dasar pemahaman terhadap masa lampau. Dengan demikian sebetulnya peserta didik tidak hanya belajar sejarah (*learning history*) tetapi juga harus belajar dari sejarah (*learning from history*). Pemahaman yang demikian ini akan memberikan nilai lebih kepada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik dalam kerangka memahami kondisi masyarakatnya di masa kini dan di masa yang akan datang. Dengan menyitir pendapat Wang Gungwu, dalam pidato pengukuhan guru besar di Universitas Gadjah Mada, Ibrahim Alfian mengatakan adanya 3 (tiga) kegunaan belajar sejarah. Pertama, sejarah berguna untuk melestarikan identitas kelompok (keluarga, klen, suku bangsa, bangsa) guna memperkuat daya tahan kelompok dan kelangsungan hidupnya. Kedua, sejarah dapat digunakan sebagai pelajaran untuk mengambil suri teladan peristiwa masa lampau. Peristiwa kegagalan tidak perlu diulangi, sedangkan peristiwa gemilang dapat ditiru dan disempurnakan. Ketiga, sejarah dapat digunakan sebagai sarana pemahaman mengenai makna hidup dan mati. Selain itu, Alfian juga menambahkan satu fungsi sejarah sebagai alat pemenuhan rasa ingin tahu para sejarawan dan peminat sejarah.

Pentingnya pembelajaran sejarah sebagai sarana untuk mencari hikmat dari peristiwa masa lampau dapat ditemukan dalam karya filsuf Collingwood. Ia menyatakan: “*knowing yourself means knowing what you can do; and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what man has done*”. Artinya memahami diri anda sendiri berarti memahami apa yang dapat anda kerjakan; dan oleh karena tidak seorang pun tahu apa yang dapat ia kerjakan hingga ia mencobanya, maka satu-satunya kunci untuk mengetahui apa yang dapat ia kerjakan adalah apa yang telah dikerjakan oleh orang (Collingwood, 1973). Dengan demikian, jika sebuah bangsa ingin tahu segala sesuatu yang sebaiknya dikerjakan saat ini dan yang akan datang secara optimal, maka bangsa itu harus

belajar dari sesuatu yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Itu berarti bahwa masyarakat harus belajar dari sejarah bangsanya.

Dengan belajar sejarah, orang tidak akan melakukan kesalahan yang sama sebagaimana pepatah mengatakan bahwa: *“a donkey does not twice hurt itself on the same stone”* (seekor keledai tidak akan tersandung dua kali pada batu yang sama). Dalam banyak ayat, Tuhan telah memerintahkan kepada manusia untuk belajar dari peristiwa lampau yang memberi pelajaran bagaimana orang yang berbuat aniaya akan memperoleh balasan yang setimpal. Dengan demikian, benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa dengan belajar sejarah orang akan menjadi lebih bijak.

Pembelajaran sejarah di sekolah juga dapat difungsikan sebagai alat untuk memahami masa kini. Seorang tokoh filsuf pendidikan, John Dewey mengatakan bahwa *“the young people should be acquainted with the past in such a way that the acquaintance is a potent agent in appreciation of the living present”*; para pemuda harus diperkenalkan dengan masa lampau sedemikian rupa karena pengenalan itu merupakan sarana yang potensial untuk dapat memberikan penghargaan kepada kehidupan saat ini (Cleaf, 1991).

Dalam konteks kebangsaan, pembelajaran sejarah juga diakui memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memupuk nasionalisme. Lebih lanjut Cleaf mengatakan bahwa dengan belajar sejarah, orang akan mengembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap warisan dan tradisi para pendahulu, dan selanjutnya dapat membandingkan kemajuan bangsa sendiri dengan bangsa lain. Bahkan, pembelajaran sejarah juga mampu berfungsi sebagai pembangkit kesadaran masa kini untuk selanjutnya mendorong manusia untuk bertindak demi kejayaan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai yang pernah diungkapkan oleh Frederik J. Teggart bahwa sejarah tidak hanya dapat membangkitkan kesadaran nasionalitas, tetapi juga mampu menjadi sarana untuk mendorong munculnya harapan-harapan di masa yang akan datang. Hal itu dapat terjadi karena narasi sejarah tidak dapat dipisahkan dengan pencapaian bangsa di masa lampau dan harapan-harapan serta aspirasi-aspirasi untuk mencapai kejayaan bangsa di masa depan (Alfian, 1999).

Pendidikan sejarah akan menjadi salah satu sarana untuk menciptakan kesadaran sejarah. Dalam tataran kebangsaan, kesadaran sejarah dapat merupakan suatu hal yang subjektif dalam arti berkaitan dengan pengalaman dan penghayatan anak bangsa terhadap masa lampau bangsanya. Kesadaran sejarah yang ditunjang oleh pengetahuan masa lampau yang objektif akan menimbulkan empati terhadap bangsanya dengan cara membayangkan dan menghidupkan kembali tindakan-tindakan manusia pada masa lampau. Selanjutnya empati ini akan membangkitkan keingintahuan anak bangsa untuk menggali lebih dalam perjalanan bangsanya di masa lampau dalam rangka menemukan jawaban dari pertanyaan mengapa segala sesuatu menjadi seperti apa yang terlihat pada masa kini. Anak bangsa yang memiliki kesadaran sejarah akan mencari jawabannya dengan belajar sejarah, sebagaimana yang pernah didengarkan oleh Bung Karno: *“jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (jasmerah)”*.

Mungkin setelah itu ia akan menjadi lebih arif dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masa depan bangsa. Jika masyarakat memiliki kesadaran sejarah maka akan dapat memahami secara tepat kondisi kekinian dan masa yang akan datang. Hal ini pernah diperingatkan oleh John F. Kennedy bahwa: *“the great enemy of truth is very often not the lie but the myth”*; musuh besar saat ini seringkali bukan kebohongan tetapi mitos (Frank, 1998). Di sinilah terlihat peran penting para sejarawan dan penulis buku sejarah. Croce dan Collingwood menyatakan bahwa sesungguhnya sejarawan lah yang memainkan peranan aktif dalam mengonstruksi sejarah (sebagai narasi) dengan melakukan *“rethinking”* terhadap realitas masa lampau. Munslow mengatakan bahwa *“the past did exist, but does not have meaning until the historian writes it as history”*.

Pendidikan sejarah dapat berfungsi sebagai wahana sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa. Dalam hal ini sosialisasi dapat dimaknai sebagai proses menanamkan dan mengembangkan/menyebarkan nilai-nilai sejarah dan budaya kepada anggota masyarakat. Adapun enkulturasi lebih dimaknai sebagai proses mempelajari nilai-nilai kebudayaan oleh seseorang. Dengan proses-proses ini diharapkan para peserta didik mengalami perubahan untuk dapat memahami dan menerima serta melaksanakan nilai-nilai budaya yang diakui dan diharapkan masyarakatnya. Di sinilah nilai-nilai multikulturalisme yang menjadi arus pemikiran dan sikap utama Indonesia yang berbhinneka tunggal ika bisa ditanamkan melalui pembelajaran sejarah di sekolah.

Memaknai Sejarah sesuai Semangat Nilai-nilai Multikulturalisme

Persepsi mahasiswa terhadap cara memaknai sejarah sesuai dengan semangat nilai-nilai multikulturalisme dari 59 responden diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4: Persepsi Mahasiswa terhadap Cara Memaknai Sejarah Sesuai Semangat Nilai-nilai Multikulturalisme

Interval Nilai	Frekwensi	Persentase (%)	Kriteria
48,76 – 60,00	8	20,34	Sangat Baik
37,51 – 48,75	47	79,66	Baik
26,26 – 37,50	-	-	Cukup baik
15,00 – 26,25	-	-	Kurang baik
Jumlah	59	100	

Sumber: Data primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persepsi mahasiswa terhadap cara memaknai sejarah sesuai dengan semangat nilai-nilai multikulturalisme diperoleh skor terbesar 47 atau 79,66% dari 59 mahasiswa sebagai responden dengan kriteria baik, sehingga dapat dikemukakan bahwa mahasiswa Progd Pendidikan Sejarah di IKIP Veteran Semarang telah mampu memaknai sejarah sesuai dengan semangat nilai-nilai multikulturalisme.

Hasil tersebut jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikemukakan bahwa untuk bisa memanfaatkan mata pelajaran sejarah sebagai media dalam penanaman nilai-nilai multikulturalisme maka paling tidak diperlukan beberapa langkah. Langkah pertama adalah *mainstreaming* fenomena multikulturalisme dalam sejarah, khususnya sejarah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran sejarah di sekolah. Langkah kedua adalah penetapan strategi dan model serta metode pembelajaran sejarah yang relevan. Dalam konteks ini, apapun pilihan strategi pembelajarannya, para guru hendaknya mampu melaksanakan pembelajaran sejarah yang mencerahkan dan bahkan sebagai latihan intelektual.

***Mainstreaming* Nilai-nilai Multikulturalisme**

Inti nilai-nilai multikulturalisme yang bisa dibangkitkan dari proses pembelajaran sejarah adalah adanya kesadaran dan apresiasi bahwa bangsa Indonesia lahir justru karena adanya kesadaran terhadap perbedaan atau kesadaran terhadap keberagaman atau pluralitas atau kebhinekaan. Oleh karena adanya perbedaan, pluralitas, dan keberagaman itulah timbul keinginan untuk bersatu guna mencapai tujuan bersama yaitu menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kesadaran untuk menerima keberagaman inilah yang bisa menjadi misi penting bagi pembelajaran sejarah di sekolah. Rangkaian perkembangan formasi bangsa Indonesia menyediakan bahan yang begitu kaya untuk bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran sejarah yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai multikulturalisme.

Dalam konteks penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai multikulturalisme inilah perlu adanya *mainstreaming* atau pengarusutamaan sejarah Indonesia sebagai sebuah proses formasi ke-Indonesia-an, yaitu elemen-elemen yang sebelumnya bersifat relatif homogen yang dipersatukan oleh kesamaan cikal-bakal kemudian terpecah karena proses diaspora secara bergelombang sehingga terbentuk berbagai macam suku bangsa yang terpisah dan berbeda-beda di kepulauan Indonesia. Selanjutnya proses saling kenal-mengenal dan *cross-cultural communication* terjadi sejalan dengan proses globalisasi ekonomi.

Mainstreaming terhadap nilai-nilai multikulturalisme dalam sejarah Indonesia dapat dilacak dari perjalanan historis berbagai komunitas di kepulauan Nusantara. Kajian geomorfologi menemukan bahwa kepulauan Nusantara telah terbentuk sejak sepuluh juta tahun sebelum homo sapien yang dipandang merupakan nenek moyang langsung dari manusia modern penghuni kawasan ini. Sisa-sisa fosil di lembah Bengawan Solo Jawa Tengah dan Jawa Timur memberikan petunjuk bahwa keberadaan hominid ini sudah ada sejak sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Penemuan sisa-sisa manusia purba (yang kemudian disebut sebagai 'Manusia Jawa') oleh Eugene Dubois di Trinil di Jawa Timur pada tahun 1891 itu memiliki peran dalam mengarahkan perhatian para ilmuwan dunia dalam pencariannya terhadap asal-usul manusia. Apakah 'Manusia Jawa' merupakan nenek moyang manusia pertama (*Homo sapiens*) dari masyarakat di kepulauan Indonesia masih belum dapat dipastikan, meskipun sisa-sisa manusia Jawa lainnya ditemukan

sampai sekitar 100.000 tahun yang lalu yang mewakili masa transisi antara Homo erectus dan manusia awal yang sesungguhnya, yang jejaknya paling awal berasal dari sekitar 40.000 tahun yang lalu. Para paleontolog juga menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan bahwa mereka merupakan manusia pertama dari kelompok etnis yang luas yang sekarang disebut Australo-Melanesia dan bahwa mereka adalah nenek moyang dari Melanesia di Papua Nugini, suku Aborigin Australia dan masyarakat kecil Negrito di Semenanjung Melayu dan Filipina.

Setelah memasuki abad masehi ketika hubungan antara pulau-pulau menjadi semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pengembangan perdagangan maritim, hubungan antar kelompok etnis di Nusantara menjadi semakin intens. Hal ini juga berdampak pada pengembangan bahasa di Nusantara. Perkembangan menarik terjadi pada bahasa Melayu sebagai nenek moyang langsung dari bahasa Indonesia. Sejak abad ke-15, Melayu telah menjadi bahasa yang dominan dari daerah pesisir di Nusantara. Dominasi ini terutama terkait dengan kegiatan komersial meningkat sejak munculnya kekuatan Islam di Timur Tengah dan daerah di sebelah timur. Dalam konteks itu, Melayu adalah bahasa yang paling penting untuk perdagangan di Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu juga sangat berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Melayu adalah bahasa dari kerajaan Melaka di Semenanjung Melayu. Melayu juga menjadi bahasa utama dari orang Muslim karena sudah menyebar ke arah timur. Akhirnya, Melayu menjadi lingua franca di Nusantara. Namun setiap suku masih digunakan bahasa dan dialeknya sendiri ketika berkomunikasi di antara mereka. Jadi faktor sejarah dan keterpisahan geografis telah menyebabkan terbentuknya pluralitas masyarakat Indonesia.

Pada zaman kolonialisme Belanda, diversitas kelompok etnik dan budaya di Hindia Belanda dipelihara. Bahkan sentimen antarkelompok etnik dibangkitkan dan dipertajam. Hal itu bisa dilihat antara lain dari pembagian wilayah administratif yang didasarkan juga atas area budaya suku bangsa, seperti: pembagian provinsi Jawa Barat (Mayoritas Sunda), Jawa Tengah (Jawa kraton), dan Jawa Timur, yaitu Jawa dengan pengaruh pesisir dan Madura yang kuat (Veer, 1997). Selain itu, politik adu domba Belanda juga memperuncing sentimen antaretnik. Hal itu terlihat dengan jelas ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan pemadaman perlawanan di suatu daerah etnik tertentu akan merekrut serdadu dari kelompok etnik yang lain. Sebagai contoh adalah pada waktu Belanda memadamkan perlawanan rakyat Aceh pada pergantian abad XX dengan menggunakan pasukan yang paling terlatih dan paling modern serta sekaligus paling kejam yang disebut Marechaussee. Pasukan ini kebanyakan terdiri dari orang-orang Jawa dan Ambon. Politik '*divide et impera*' ini juga diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam mengatasi persoalan pergerakan nasional Indonesia pada awal abad XX ketika segenap elemen kawula Hindia Belanda mencoba untuk membangun sebuah bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian pluralitas masyarakat Indonesia disamping merupakan potensi keunikan juga sekaligus memiliki potensi perpecahan. Namun demikian sejarah menunjukkan bahwa justru karena sadar akan

pluralitas itulah para elit Indonesia pada waktu itu memiliki semangat untuk membangun komitmen sebagai sebuah negara-bangsa.

Strategi dan Metode Pembelajaran

Salah satu tantangan guru sejarah di sekolah adalah bagaimana materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik terkait dengan kepentingan kekinian dan mampu memberikan pencerahan kepada alam berpikir peserta didik dalam memahami persoalan kekinian berdasarkan pengetahuan masa lampau (sejarah). Demikian juga, pembelajaran sejarah mestinya mampu membebaskan pikiran peserta didik dari kungkungan belenggu destruktif masa lampau seperti ketidaktahuan, pemalsuan, distorsi, penggelapan, dan sebagainya. Menurut Bernstein, pembelajaran sejarah dapat difungsikan sebagai media untuk membangun pemikiran dan sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang ahistoris dengan cara melakukan justifikasi peristiwa masa lampau dengan standar nilai-nilai kekinian dan sebaliknya juga menjadi media kritis terhadap pemanfaatan filsafat dan mitos masa lampau untuk menghakimi kondisi kekinian (Curtis, 2002). Dalam konteks ini perlu dipahami ciri-ciri pengajaran sejarah yang mampu memberikan pencerahan sosial kepada masyarakat yang dapat dijadikan acuan oleh para guru sejarah.

Pertama, pengajaran sejarah seharusnya mampu memberikan sumbangan dalam proses pembentukan masyarakat madani yaitu masyarakat yang demokratis, memiliki *trust*, multikulturalis dan menerima pluralisme, tidak mengharamkan perbedaan, dan sebagainya (Purwanto, 2006). Jadi, sebaliknya jika pengajaran sejarah akan menghasilkan generasi yang anti demokrasi, mengalami sindrom krisis kepercayaan, tidak toleran dan mengharamkan keragaman, maka pengajaran sejarah telah gagal mengemban fungsinya.

Sejak dini para peserta didik perlu diberi pemahaman mengenai hakikat ilmu sejarah yang selalu dinamis, berkembang dan terbuka. Siapa pun memiliki kebebasan untuk menulis apa pun sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan rasional. Dalam hal ini, masyarakat harus diberi pencerahan untuk dapat menerima perbedaan pendapat dan hasil penelitian mengenai sejarah. Demikian juga, masyarakat termasuk peserta didik harus diberi “otonomi” untuk mengembangkan pemikirannya tentang masa lampau. Biarlah peserta didik terbiasa dengan perbedaan pendapat dan menilai sendiri sejarah. Dengan demikian, upaya menutup-nutupi peristiwa sejarah tertentu untuk tidak disampaikan kepada peserta didik perlu ditinjau kembali. Pelajaran dari sejarah sebetulnya bukan hanya berasal dari peristiwa yang dianggap sebagai sebuah kemenangan dan kebanggaan, tetapi juga dari peristiwa kekalahan yang dianggap memalukan. Semua peristiwa kemenangan atau kekalahan, kejayaan atau kemunduran, membanggakan atau memalukan akan memberikan hikmah yang sama (Sulistiyono, 2004).

Kedua, pengajaran sejarah yang mampu mencerahkan adalah pengajaran yang “manusiawi”, artinya betapa pun hebatnya seseorang yang dianggap tokoh sejarah atau sebaliknya betapa pun kerdilnya jiwa seseorang yang dilecehkan dalam sejarah, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sejarah yang

dinarasikan oleh guru adalah sejarah manusia, bukan sejarah para malaikat yang imun dengan salah dan kilaf. Oleh karena itu, pengajaran sejarah yang memiliki nilai pencerahan sosial adalah pengajaran sejarah yang sejauh mungkin menghindari narasi yang banyak memuat pola-pola oposisi biner hitam-putih antara pemenang dan pecundang atau antara pahlawan dan pengkhianat, sebab stigma-stigma semacam itu bersifat situasional dan subjektif, dan akan menyebabkan proses pelanggaran prasangka, dendam dan desintegrasi sosial dalam masyarakat plural (Purwanto, 2006).

Ketiga, pembelajaran sejarah yang berfungsi sebagai pencerah adalah pembelajaran sejarah yang memiliki *point of departure* dari situasi dan persoalan yang aktual dan kontekstual. Hanya dengan cara demikian, para peserta didik memperoleh kesadaran bahwa belajar sejarah bukan untuk masa lampau itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Peserta didik tidak hanya dapat memperoleh materi dan substansi sejarah (*learning history*), tetapi juga dapat belajar dari sejarah (*learning from history*). Dengan demikian, generasi mendatang tidak akan mengulangi kesalahan dan kebodohan yang sama yang pernah dilakukan oleh pendahulunya di dalam sejarah bangsanya. Dalam hal ini persoalan-persoalan ketegangan, konflik dan kekerasan sosial yang secara aktual masih marak terjadi dapat dimanfaatkan sebagai *point of departure* bagi pembelajaran sejarah untuk membangkitkan nilai-nilai multikulturalisme.

Pembelajaran Sejarah sebagai *Intellectual Training*

Dalam memanfaatkan pembelajaran sejarah sebagai media dalam penanaman nilai-nilai multikulturalisme, guru barangkali perlu mengembangkan model pembelajaran sejarah sebagai pendidikan intelektual (*intellectual training*) dan pendidikan moral (*moral education*), bukan sebagai indoktrinasi (*indoctrination*) sebagai layaknya pelajaran agama. Sebagai pendidikan intelektual, pembelajaran sejarah bukan hanya memberikan gambaran masa lampau, tetapi juga memberikan latihan berpikir kritis, menarik simpulan, menarik makna dan nilai dari peristiwa yang dipelajari. Latihan berpikir kritis dapat dilakukan dengan mengembangkan wacana analitis, misalnya dengan mengajukan pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”, bukan sekedar pertanyaan “apa”, “siapa”, “kapan”, dan “di mana” (Gunning, 1978). Jika guru memiliki *concern* terhadap moral generasi muda, maka pembelajaran sejarah sebagai pendidikan moral juga perlu ditekankan oleh para guru. Namun demikian, perlu diingat bahwa pendidikan moral dalam pembelajaran sejarah bukanlah bersifat doktriner dan manipulatif dalam interpretasi. Dalam hal ini, letak pendidikan moral pembelajaran sejarah justru kesediaannya untuk memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik (tentu dengan bimbingan guru) untuk menarik sendiri simpulan dan makna peristiwa yang dipelajari sehingga peserta didik betul-betul dapat menghayati sesuatu yang dipelajarinya. Selain itu, unsur pendidikan moral dalam pembelajaran sejarah dapat dilaksanakan jika pembelajaran sejarah berorientasi pada pendidikan kemanusiaan (*humaniora*) dan norma sosial dalam rangka pembentukan sikap demokratis, tidak alergi terhadap perbedaan, memiliki kepercayaan (*trust*) terhadap orang lain dan

sebaliknya dapat dipercaya, serta bertanggungjawab baik terhadap dirinya maupun masyarakatnya. Untuk itu dalam proses pembelajaran sejarah, guru juga perlu memiliki sikap demokratis, terbuka, dialogis, menghargai pendapat peserta didik, serta mampu mendorong minat peserta didik terhadap pembelajaran sejarah. Hanya dengan cara demikian pembelajaran sejarah di sekolah dapat berfungsi sebagai pembebas pikiran peserta didik dari tirani mitos kelampauan yang membelenggu kemerdekaan pikir peserta didik.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian yang dikonfirmasi dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat diberikan simpulan: 1) persepsi mahasiswa terhadap pemahaman konsep nilai-nilai multikulturalisme adalah baik hal ini didukung perolehan skor 48 atau 81,35% dari 59 mahasiswa dengan kriteria baik; 2) persepsi mahasiswa terhadap penanaman nilai-nilai multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah adalah baik, hal ini didukung perolehan skor 51 atau 86,44% dari 59 mahasiswa dengan kriteria baik; dan 3) persepsi mahasiswa terhadap cara memaknai sejarah sesuai dengan semangat nilai-nilai multikulturalisme adalah baik, hal ini didukung perolehan skor 47 atau 79,66% dari 59 mahasiswa dengan kriteria baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. Ibrahim, 1985, "Sejarah dan Permasalahan Masa Kini", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada*. .
- Alfian, 1999, "Sejarah dan Permasalahan Masa Kini", Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Bottomley. C. Daniel, 2014, *A Nation that is Religious: Indonesia, the Ahmadiyah, and the State's SARA Echoes*. Disertasi pada University of Delaware.
- Cleaf, D.W.V., 1991, f, *Action in Elementary Socil Studies*, Boston: Allyn and Bacon.
- Curtis B. Dalton. 2002, "Text Versus Context: A Dilemma for the Historian of Educati-onal Thought", dalam: *Journal of Philosophy and History of Education*.
- Dewey, J., 1938, *Experience and Education*, London: Collier Macmillan.
- Frank, Andre Gunder, 1998, *Reorient: Global Economy in the Asian Age*, Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
- Gunning D. 1978, *The Teaching of History*, London: Croom Helm.
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170316/281578060472622>, "SARA masih Dominasi Sumber Konflik Horizontal", (Dikunjungi: 12 Januari 2018).
- <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/1876-konflik-sara-penyebab--disintegrasi-bangsa.html>. "Konflik SARA Penyebab Disintegrasi Bangsa", (Dikunjungi: 13 Januari 2018)

- <http://www.history.ac.uk/ihr/Focus/Whathistory/munslow.3.html> Munslow, Alun. "Author's Response", (Dikunjungi tanggal 4 Januari 2018).
- Purwanto, Bambang, 2006, *Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris?*, Yogyakarta: Ombak.
- Slamet, 2017, *Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Bermuatan Nilai-nilai Multikultural (PBA-BNM) bagi Guru Sejarah SMA*, Semarang: PPs-Universitas Negeri Semarang, Disertasi, tidak Dipublikasikan.
- Sulistiyono, Singgih Tri Sulistiyono., 2004, "Membebaskan Diri dari Tirani Masa Lampau: Penulisan Kembali Sejarah Tragedi 1965 dan Harapan Rujuk Sosial", paper disajikan pada *Peluncuran Buku Tanah Berdarah di Bumi Merdeka: Menelusuri Luka-luka Sejarah 1965-1966 di Blora Karya Dalhar Muhammadun*, Blora: 22 Mei.
- _____, 2011, Multikulturalisme dalam Perspektif Budaya Pesisir, makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional: "*Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata*" yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Semarang: 7 Juli.
- Tilaar, H.A.R, 2004, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Veer, Paul Van't., 1977, *Perang Belanda di Aceh*. Penerjemah: Aboebakar, Banda Aceh: Dinas P dan K Daerah Istimewa Aceh.